

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam pemberdayaan program MGMP SMA/SMK berjalan dengan kurang baik. Hal ini disebabkan adanya beberapa ketidaksesuaian proses manajemen Dinas dibanding teori yang digunakan peneliti.

1. **Planning** atau perencanaan berarti memutuskan tujuan berdasarkan ramalan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi (kecenderungan), perubahan (*change*) dan masalah-masalah pada waktu yang akan datang tersebut. Dalam perencanaan yang ada terhadap program ini, anggaran yang diberikan oleh pemerintah relatif kecil sehingga tujuan agar tercapainya program pemberdayaan MGMP tidak terlaksana, disebabkan oleh berkurangnya MGMP yang diberdayakan, dari semula 16 MGMP menjadi 9 MGMP. Kemudian pelaksanaan dari program pemberdayaan MGMP ini dilakukan dalam rentang waktu satu tahun yang disebut juga dengan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
2. **Organizing** atau pengorganisasian adalah mengatur faktor manusia yang disertai tugas-tugas dalam pelaksanaan kerja (*organizing work staffing*)

dan melimpahkan wewenang dan tanggungjawab terhadap seorang yang memangku jabatan. Kurangnya sumber-sumber daya manusia baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia, kemudian terdapatnya pelimpahan wewenang yang terlalu banyak terhadap satu pihak yang menyebabkan adanya rangkap jabatan, hal ini menandakan bahwa pengorganisasian (*organizing*) dalam program pemberdayaan MGMP tidak/belum tercapainya tujuan program menurut teori Dalton E.Mc Farland.

3. **Controlling** atau pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selalu berdasarkan kepada Term of Reference (TOR), Workshop Pemberdayaan MGMP maupun TOR yang lain dan juga berdasarkan panduan workshop yang telah dibuat/direncanakan sebelum kegiatan dilakukan. Tidak ada bentuk instruksi/perintah langsung dari Dinas terhadap forum MGMP dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam pemberdayaan program MGMP SMA/SMK berjalan dengan kurang baik. Hal ini disebabkan ketidakmampuan Dinas dalam memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga terjadi

kekurangan dalam hal dana oleh Dinas dalam menjalankan program. Banyaknya rangkap jabatan disebabkan kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya instruksi langsung dari Dinas tidak mempengaruhi kelancaran program pemberdayaan MGMP SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat.

6.2. Saran

- a) Pada segi *planning* sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat lebih mengutamakan dan menitikberatkan alokasi dana untuk peningkatan mutu pendidikan terutama terhadap peningkatan kualitas/profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik.
- b) Dari segi *organizing*, sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melakukan penambahan sumber daya manusia (*rekrutment*) untuk menghindari rangkap jabatan.
- c) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan sebaiknya lebih memberikan instruksi/arahan dari Dinas sebagai perintah langsung kepada forum MGMP dalam melaksanakan kegiatan.

